

How Internal Auditor Understand, Adapt and Respond to Global Risk

Sophia Issabella Watimena
Ketua Dewan Audit
merangkap Anggota Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan

IIA Townhall Meeting

Jumat, 24 Januari 2025





AGENDA



- 1 Landscape Risiko Global dan Indonesia**

- 2 Peran Profesi Auditor Internal**

01

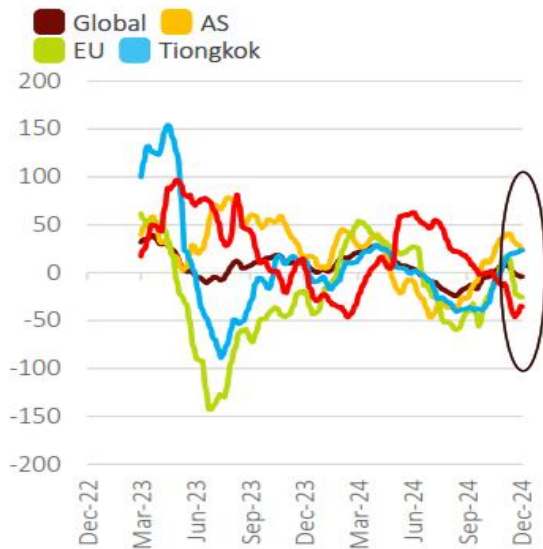
Landscape Risiko Global dan Indonesia



Data perekonomian global di akhir tahun 2024 berada di bawah ekspektasi...

Data perekonomian global pada Desember 2024 secara umum menunjukkan penurunan

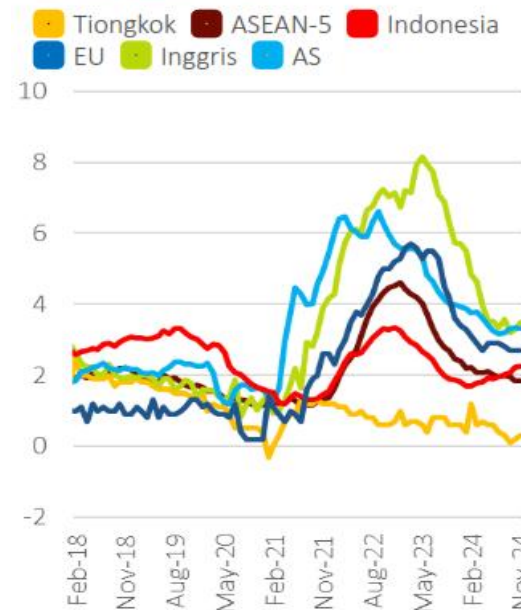
Citi Global Economic Surprise Index¹ | indeks



¹ Sum of the difference between official economic results and forecasts. A positive figure indicates that actual data is better than market expectations.

Core inflation cenderung bergerak sideways..

Core Inflation² | % yoy

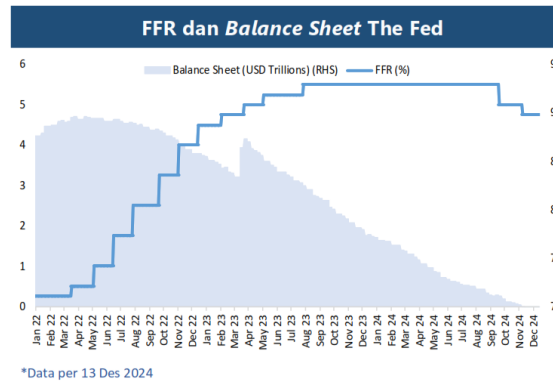


² Core inflation is the CPI index excluding food and energy price components.

ASEAN-5: Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, and Vietnam.

The Fed memangkas FFR, namun lebih hawkish..

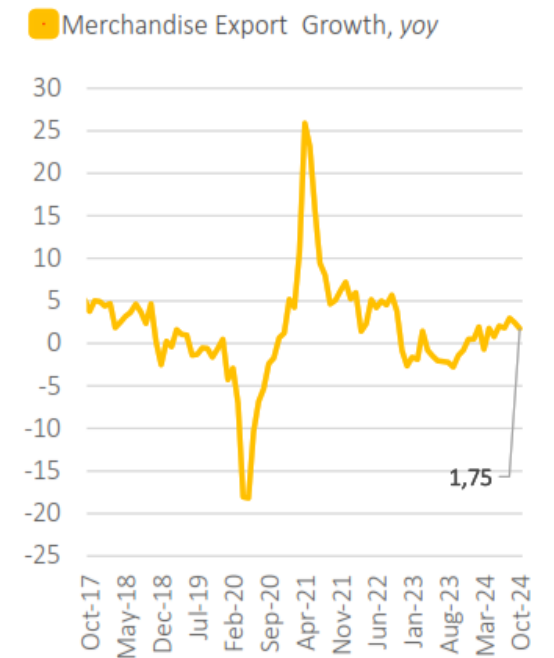
Pada 7 November 2024, The Fed menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 bps, ke kisaran 4,50%-4,75%, sesuai dengan prakiraan pasar.



*Data per 13 Des 2024

Sementara, pertumbuhan perdagangan global masih relative rendah

Merchandise export | indeks, % yoy



Sumber: Bloomberg, MacroMicro

Di tengah perlambatan ekonomi global, kinerja fiskal Indonesia mampu meredam gejolak..

<< Semester I

Semester II >>

DEFISIT APBN
2,29% PDB

OUTLOOK LAPSEM
DEFISIT 2,70% PDB

DEFISIT
TERKENDALI
2,29% PDB

▼ Inflasi
Meningkat
(tertinggi di Maret
3,1%)

▼ Rupiah
Terdepresiasi
(Des 2023: Rp15.416 ;
Juni 2024: Rp16.421)

▼ IHSG Melemah
(Des 2023: 7.272,8 ;
Juni 2024: 7.063,6)

▼ Yield SBN
naik
(tertinggi di
bulan April &
Juni 7,2%)

▼ Geopolitik

▼ El Nino

▼ Perlambatan
Ekonomi
Tiongkok

▼ Harga
Minyak
Tinggi

▼ Harga
Coal
Rendah

▼ Penerimaan Negara
terkontraksi 6,2%
yoy



▲ Tekanan Harga
Minyak Mereda

▲ Stimulus Fiskal
& Moneter
Tiongkok

▲ Harga Batu Bara,
Nikel, dan CPO
Meningkat

▲ Penerimaan Negara
tumbuh positif
2,1% yoy

▲ Yield SBN
kompetitif (Des
2024: 7%)

▲ Inflasi terkendali
dan rendah (Des
2024: 1,57%)

▲ Tekanan Rupiah
mereda (dari
Rp16.421 menjadi
Rp16.162)

APBN sebagai Shock Absorber

Sumber: Konferensi Pers APBN 2024 (Youtube
Kementerian Keuangan, 2025)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 diperkirakan positif dan lebih tinggi dari global, negara-negara maju, dan EMDE..

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Th. 2025



5,2%

Sumber Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia:

1. Komponen investasi tumbuh 5,5%
2. Ekspor tumbuh 5,4%
3. Konsumsi rumah tangga dan pemerintah tumbuh 5%

Sumber: Nota Keuangan 2025

PERBANDINGAN:

**Global Economic Outlook
2024 & 2025 : 3,2% (stagnant)**

**Emerging Markets and
Developing Economy (EMDE)
2025 : 4,2%**

**Developed Countries
2025 : 1,8%**

Sumber: World Economic
Outlook, IMF (2024)

Outlook 2025



Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan stagnan, serta masih dibayangi oleh perlambatan ekonomi Tiongkok dan risiko geopolitik



Target inflasi negara utama diperkirakan dapat dicapai, namun dapat terdistrupsi oleh trade wars dan konflik geopolitik



Suku Bunga dan likuiditas global terus mengalami normalisasi, namun dengan pace lebih lambat dari perkiraan awal



Harga komoditas ternormalisasi, dengan harga energi diperkirakan turun



Risiko geopolitik dapat menjadi black swan, dengan Trump risk akan menambah ketidakpastian dan deglobalisasi perekonomian global

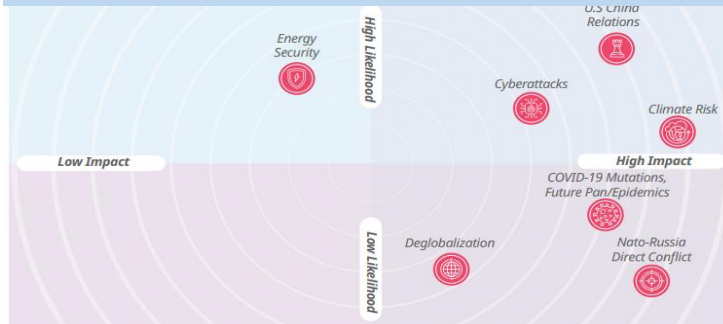
Selain perlambatan ekonomi, Cybersecurity, Digital Disruption, dan Climate change akan menjadi top global risk dalam beberapa tahun kedepan. Sementara itu Misinformation (Window Dressing), Fraud, dan Risiko Geopolitik juga menjadi risiko yang perlu diwaspadai..

Global Risk Trends

2023	2024	2027
Last Year's Risk	Current Year's Risk	Risk Expectations in 3 Years
1 Cybersecurity 73%	1 Cybersecurity 73%	1 Cybersecurity 69%
2 Human capital 51%	2 Business continuity 51%	2 Digital disruption (including AI) 59%
3 Business continuity 47%	3 Human capital 49%	3 Business continuity 47%
4 Regulatory change 39%	4 Digital disruption (including AI) 39%	4 Human capital 42%
5 Digital disruption (including AI) 34%	5 Regulatory change 38%	5 Climate change/environment 39%
6 Financial liquidity 32%	6 Market changes/competition 32%	6 Regulatory change 37%
7 Market changes/competition 32%	7 Financial liquidity 31%	7 Geopolitical uncertainty 31%
8 Geopolitical uncertainty 30%	8 Geopolitical uncertainty 30%	8 Market changes/competition 30%
9 Governance/corporate reporting 27%	9 Governance/corporate reporting 25%	9 Financial liquidity 25%
10 Supply chain (including third parties) 26%	10 Organizational culture 24%	10 Supply chain (including third parties) 24%
11 Organizational culture 26%	11 Fraud 24%	11 Governance/corporate reporting 22%
12 Fraud 24%	12 Supply chain (including third parties) 23%	12 Fraud 21%
13 Communications/reputation 21%	13 Climate change/environment 23%	13 Organizational culture 20%
14 Climate change/environment 19%	14 Communications/reputation 20%	14 Communications/reputation 15%
15 Health/safety 11%	15 Health/safety 11%	15 Health/safety 10%
16 Mergers/acquisitions 6%	16 Mergers/acquisitions 6%	16 Mergers/acquisitions 9%

Sumber: 2025 Risk In Focus (IIA,2024)

Serangan Siber sebagai urutan ke-2 (S&P Global, 2023)



Hal yang sama juga disampaikan oleh S&P Global (2023), yang menguraikan bahwa **serangan siber merupakan urutan ke-2 (dua) risiko global** dengan tingkat kemungkinan terjadi (*likelihood*) paling tinggi serta memiliki **dampak yang paling signifikan secara keseluruhan**.

Global Risks Perception Survey, 2025



Risk categories | Economic | Environmental | Geopolitical | Societal | Technological

Sumber: Global Risk Report (WEF, 2025)

Misinformasi, cuaca ekstrem, geopolitik, risiko siber masuk dalam *top risk* jangka pendek. Dalam jangka panjang risiko cuaca ekstrem/perubahan iklim cenderung meningkat, dan risiko penggunaan AI perlu diwaspadai.

Risiko Kebocoran Data Nasabah



Indonesia menempati posisi top 3 dunia perihal **data breach account** terbanyak dengan jumlah 13,2 juta data pengguna internet. Kelima negara di atas berkontribusi lebih dari separuh *total data breach* global.

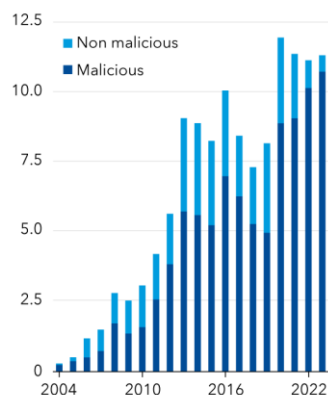
Sumber: Cyber Crime Statistic, AAG-IT (2024)

Atensi terhadap *cybersecurity* terus meningkat seiring dengan peningkatan kasus di berbagai sektor, termasuk sektor jasa keuangan..

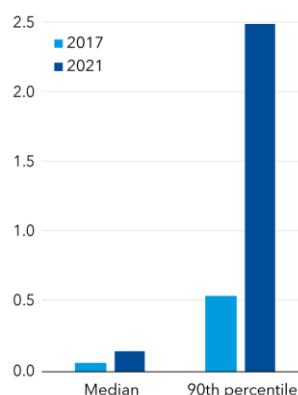
Greater threat

The risk of suffering a cyberattack and extreme losses from it has increased.

Cyber incidents
(thousands)



Estimated maximum firm loss
(billions of US dollars)



Sources: Advisen Cyber Loss Data; Capital IQ; and IMF staff calculations.
Note: Panel 1 cyber events are classified according to Advisen. Delayed reporting may lead to the underestimation of cyber events in more recent periods. Panel 2 is based on the estimated posterior density function of the highest loss of all firms within a year.

IMF

Ancaman siber baik *malicious* maupun *non-malicious* terus meningkat sejak 2004 hingga 2022. Terjadi lonjakan ekstrem pada potensi kerugian perusahaan, dari 2017 ke 2021, terutama pada Perusahaan-Perusahaan yang masuk dalam 90th percentile.

Sumber: WEF (2024)

Attractive target

The financial sector has suffered more than 20,000 cyberattacks, causing \$12 billion in losses, over the past 20 years.

Financial sector cyber incidents
(number, 2004-23)



Financial sector losses
(billions of US dollars, 2004-23)



Source: Advisen cyber loss data and IMF staff calculations.

IMF

Sektor keuangan menjadi target utama dengan jumlah **kerugian** yang timbul mencapai **12 miliar US Dollar**. IMF mendesak lembaga jasa keuangan meningkatkan **keandalan *cybersecurity*** dan mendorong regulator untuk mengembangkan kerangka ***cybersecurity*** yang memadai.

Sumber: WEF (2024)

Tren Peristiwa Serangan Siber di Indonesia



Sumber: Lanskap Keamanan Siber Indonesia & Laporan Bulanan Monitoring Keamanan Siber BSSN.

Tren anomali trafik/serangan siber yang cenderung mengalami peningkatan pada rentang tahun 2019 sampai 2020, serta meningkat **hingga lebih dari 3 kali lipat di tahun 2021**. Meskipun tahun berikutnya menunjukkan tren anomali trafik yang relatif menurun, namun **potensi ancaman siber tetap ada serta semakin advanced dan bervariasi**.

Contoh Kejadian Serangan Siber di Indonesia

TEMPO Menu Harian Mingguan Tempo Plus

Ekonomi Ekonomi Sinyal Pasar Bisnis Kelestarian

Terpopuler: LockBit Bocorkan Data Nasabah █████ Ancaman Phishing dan Scamming Mengintai Pemilik Rekening

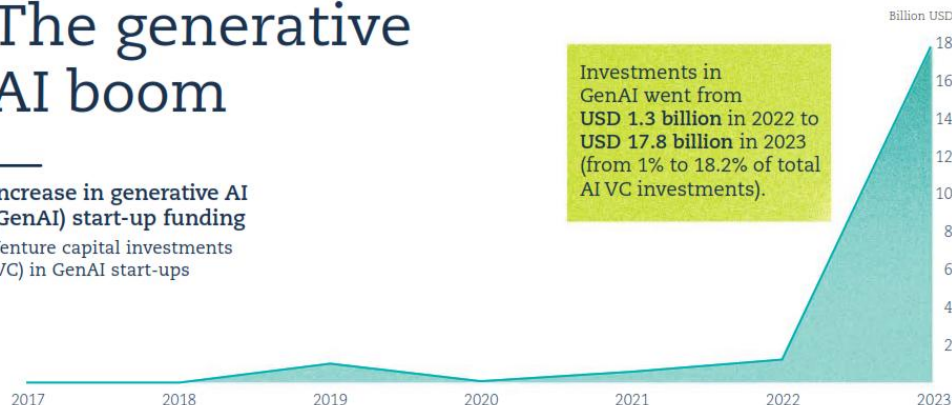
Berita terpopuler: LockBit bocorkan 15 juta data nasabah █████ ancaman phishing dan scamming mengintai pemilik rekening

17 Mei 2023 | 06.00 WIB

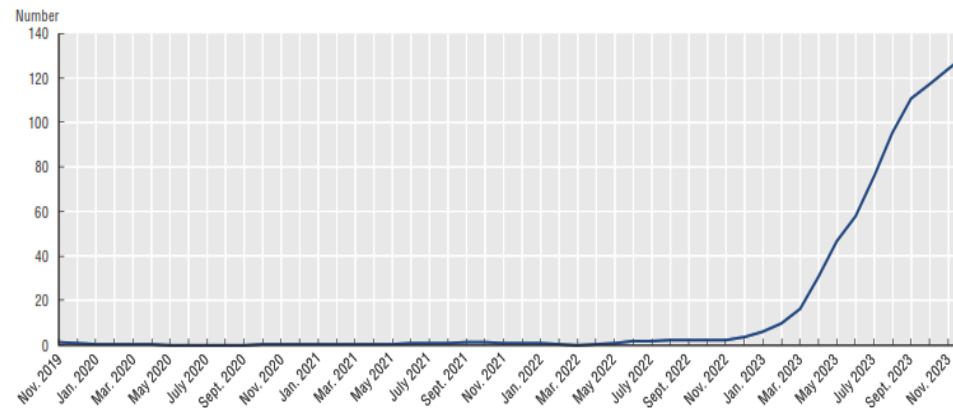
Selain *cybersecurity*, penggunaan Gen AI yang masif juga disertai insiden kegagalan dan risiko AI yang terus meningkat

The generative AI boom

Increase in generative AI (GenAI) start-up funding
Venture capital investments (VC) in GenAI start-ups

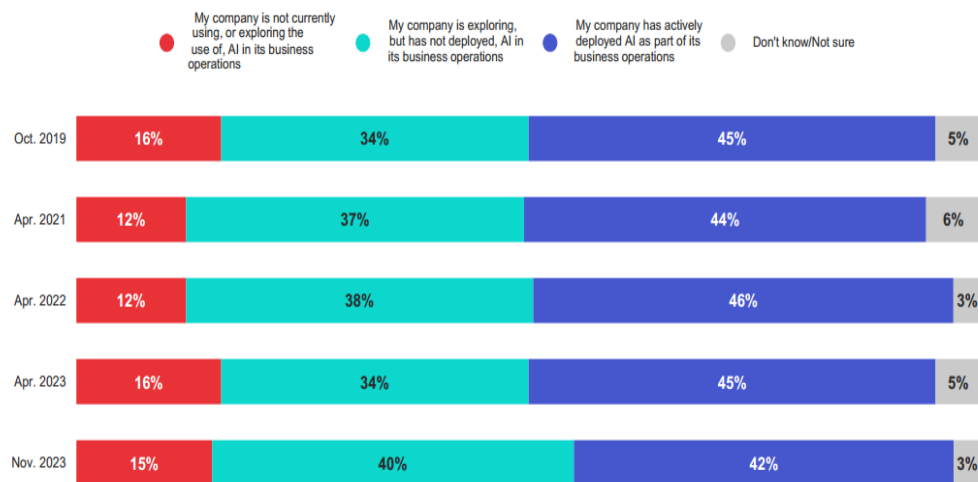


Sumber: OECD (2024)

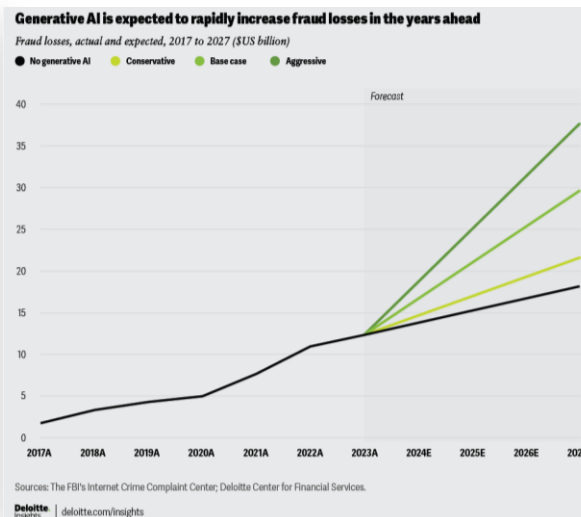


Notes: This chart shows the three-month moving average of real count of incidents and hazards reported. Results might differ from previous analysis due to modifications in the methodology of clustering articles into incidents.

Sumber: OECD Digital Economy Outlook (OECD, 2024)

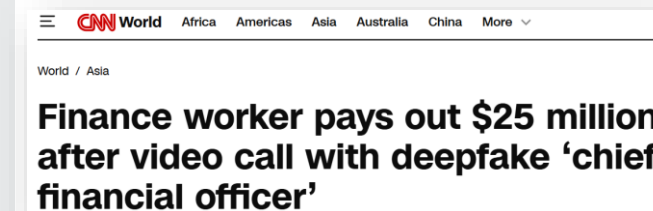


Sumber: IBM GLOBAL AI ADOPTION INDEX – ENTERPRISE REPORT 2023



Sumber: PwC (2024)

Deloitte's Center for Financial Services memprediksi bahwa Gen AI dapat menyebabkan kerugian fraud mencapai US\$40 miliar pada tahun 2027, meningkat pesat dari US\$12,3 miliar di tahun 2023, dengan CAGR sebesar 32%.



(CNN) — A finance worker at a multinational firm was tricked into paying out \$25 million to fraudsters using deepfake technology to pose as the company's chief financial officer in a video conference call, according to Hong Kong police.

Selain cybersecurity dan AI, *Climate Change* yang telah menimbulkan dampak nyata kerugian ekonomi juga menjadi risiko utama global

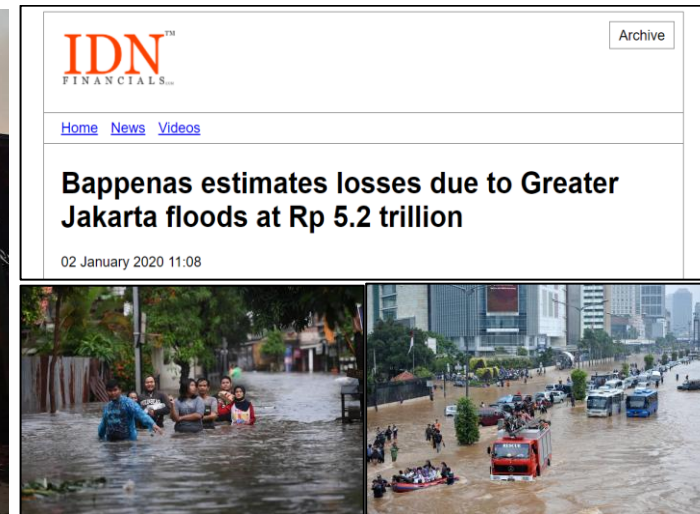
US NEWS

LA wildfires have caused more than \$250 billion in damages and economic loss: report

By Patrick Reilly

Published Jan. 15, 2025, 1:18 p.m. ET

13 Comments



Global commitment to keep global temperature rise below 2°C and seek to limit it to 1.5°C - COP21 (Paris Agreement)

WORLD
ECONOMIC
FORUM

CLIMATE ACTION

Climate change is costing the world \$16 million per hour: study

- **Climate-change attributed costs** of 185 extreme weather events from 2000 to 2019 to total \$2.86 trillion, averaging \$143 billion annually.
- This cost is **expected to increase** over time as the impacts of climate change become more severe.
- The global cost of climate change damage is estimated to be between **\$1.7 trillion and \$3.1 trillion per year by 2050**.
- This includes the **cost of damage to infrastructure, property, agriculture, and human health**.

Source: WEF (2023)

IMPACT TO INDONESIA'S ECONOMY



Agriculture and Marine Sectors, which contribute around 13% to Indonesia's GDP, are highly vulnerable to extreme weather.

Floods and Landslides occur during the rainy season could reduce Indonesia's GDP growth by up to 0.1% per year.

Extreme Weather could potentially make Indonesia lose **0.66% to 3.45%** of its GDP due to climate risks.

Untuk mengatasi perubahan iklim, OJK mendorong penerapan Sustainable Finance antara lain melalui penerbitan Taksonomi

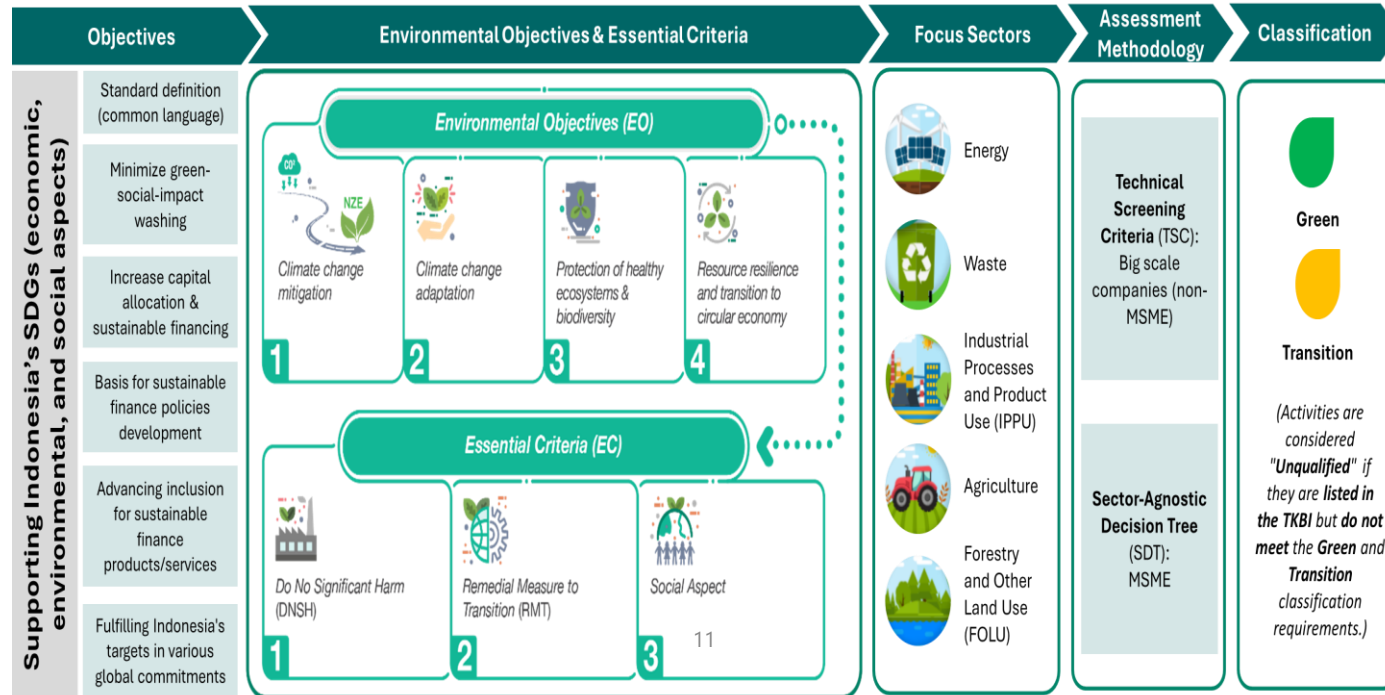
Kuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)

What is TKBI?

TKBI classifies economic activities that support Indonesia's Sustainable Development Goals, encompassing economic, environmental, and social aspects.

Benefit of TKBI?

- Is identifiable as sustainable
- Enhance reputation
- Attract more international capital and financing



EC1: Do No Significant Harm (DNSH)

An activity that contributes to an EO must not harm, have a negative impact, or cause damage to other EOs.

EC2: Remedial Measures to Transition (RMT)

Steps to ensure that any actual or potential significant damage/loss can be eliminated or minimized.

EC3: Social Aspects (SA)

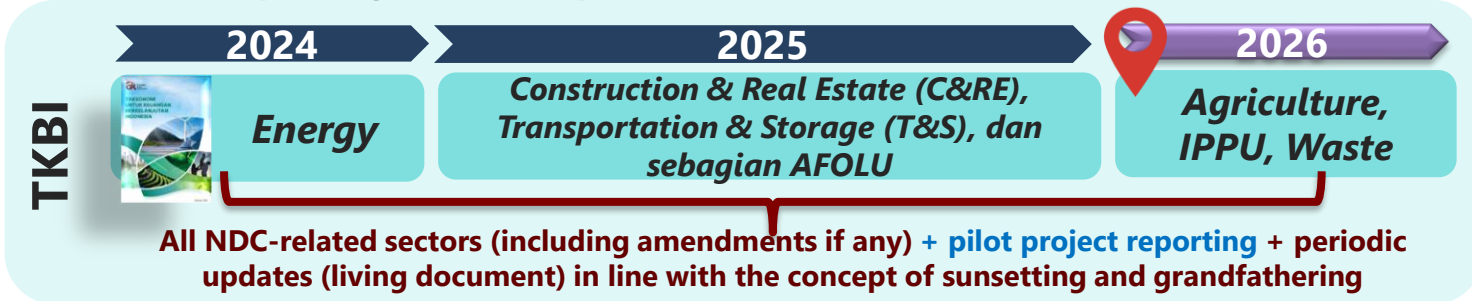
Fulfilling the established social aspects, including:

- a. **Protection and Respect for Human Rights**
- b. **Labor:** Includes decent work, prevention of forced labor, protection of women workers, and prohibition of child labor and human resource development.
- c. **Impact on communities living near investment areas:** Includes job creation, poverty alleviation efforts, and economic growth.

Green	
General Principles	Explanations
In line with the commitment of keeping the global temperature rise below 1.5°C as per the Paris Agreement, including considering Indonesia's net zero emission by 2060 (or earlier) and its ramifications on surrounding social aspects.	Activities that align with the "Green" criteria in one of the EO and all essential criteria, namely: <ul style="list-style-type: none"> a) Avoid causing damage or loss (DNSH) to other EO. In cases where such damage or loss occurs, RMT are in place to mitigate the impact and ensure no further damage or loss is caused to other EO. b) Meet all specified requirements outlined in SA

Transition	
General Principles	Explanations
Activities that presently do not align with the commitment to curb the rise in global temperatures and have not embarked on the path toward net-zero emissions can, however: <ul style="list-style-type: none"> • Transition toward "Green" classification within a specified timeframe • Facilitating significant emission reductions in the short or medium term with specific deadlines; or • Encouraging other activities to be sustainable. and fulfilling the social aspects. 	Activities that meet the "Transition" criteria in one of the EO and fulfilling part of the EC, should: <ul style="list-style-type: none"> a) Avoid causing damage or loss (DNSH) to other EO, even after conducting RMT b) Establish a plan for future enhancements or improvements. c) Satisfy all specified requirements outlined in SA.

Dan beberapa kebijakan lain seperti CRMS dan harmonisasi ketentuan..



Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening

1. coordination in developing and establishing Sustainable Finance strategies, policies, and programs;
2. optimization of fiscal, microprudential, monetary, payment system, and macroprudential policy support;
3. development of databases and supporting infrastructure for the implementation of Sustainable Finance; and
4. coordination in developing a sustainable taxonomy.

Government Regulation on Sustainable Finance Committee and sustainable taxonomy

Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS)



END
2026

- ✓ **Government Regulation on sustainable taxonomy**
- ✓ **TKBI finalized for all NDC sectors**
- ✓ **Full Implementation of Climate Risk Management Policy.**
- ✓ **POJK adopts IFRS S1 and S2 standards**

POJK 51/2017 update - IFRS S1 and S2 adoption considering developments at DSK-IAI (Assumption DSK IAI Standard published in TW II 2025)



02

Peran Profesi Auditor Internal



Peran auditor internal semakin relevan terhadap risiko keamanan siber dan AI dalam beberapa cara..

Upaya Proaktif & Manajemen Risiko

Auditor internal **harus agile dalam beradaptasi** dengan perkembangan risiko yang ada serta mengambil langkah **proaktif** mengantisipasi ancaman dengan **menggunakan AI atau data analytics** untuk menganalisis dan memonitor data secara kontinyu guna **mendeteksi aktivitas anomali lebih cepat**.

Meningkatkan Ketahanan Siber

Auditor internal mesti membantu organisasi memperkuat ketahanan terhadap ancaman siber dengan **mengidentifikasi kelemahan dan potensi dampak** dari sistem keamanan IT yang kurang memadai.

Menjembatani *Communication Gap*

Auditor memiliki pemahaman yang komprehensif tentang aspek operasional dan teknis, salah satunya melalui hasil *assurance IT*, sehingga pemahaman ini penting untuk **menyampaikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan kepada top management** yang kadang sulit disampaikan oleh tim IT

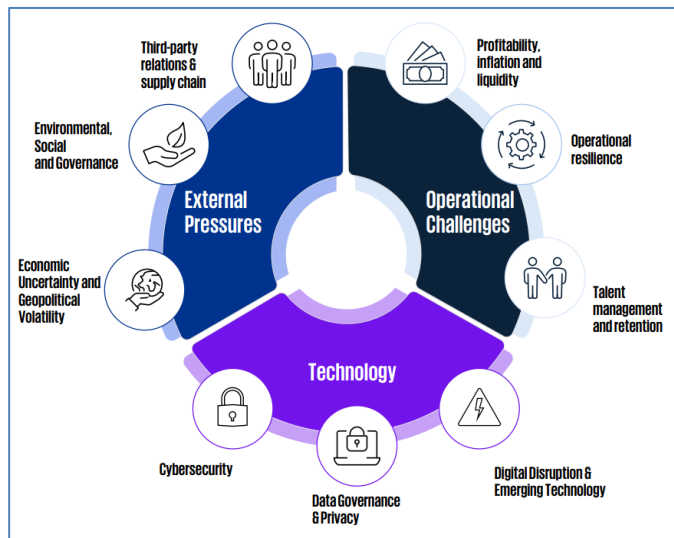
Peningkatan Kompetensi, Awareness, & Kolaborasi

Auditor internal berperan dalam **mendorong kompetensi dan awareness** terhadap isu keamanan siber dan AI untuk membentuk budaya organisasi yang lebih sadar risiko.

Mengedepankan peran asosiasi untuk berkolaborasi dengan berbagai stakeholders dalam rangka penguatan fungsi audit intern.

Kepatuhan & Tata Kelola

Auditor internal memastikan organisasi **mematuhi peraturan dan standar yang berlaku**.



Selain aspek teknologi seperti *cybersecurity* dan AI, untuk tahun 2025, Internal Audit juga mesti memperhatikan area-area lain yang berisiko, antara lain dengan:

- Memastikan pengendalian internal pada operasional perusahaan seperti bidang SDM dan keuangan telah dilaksanakan dengan baik, termasuk memastikan integritas laporan keuangan bank
- Melakukan *review* dampak perlambatan ekonomi terhadap kebijakan investasi dan pembiayaan, serta praktik *supply chain* pada perusahaan;
- Menilai kesiapan pelaporan ESG (rencana penerbitan PSPK 1 dan PSPK 2 sebagai tindak lanjut atas IFRS S1 dan S2) serta pelaksanaan *stress test* risiko iklim bagi perbankan (Climate Risk Management & Scenario Analysis/CRMS); dan

Sumber: Global Perspectives & Insights on Cybersecurity (IIA, 2025) , Internal Audit: Key Thematic Areas to Consider in 2025 (KPMG)

Penguatan fungsi Audit Internal juga perlu terus dilakukan antara lain dengan mengadopsi International Framework (Global Internal Audit Standards/GIAS) yang mulai berlaku pada Januari 2025

Global Internal Audit Standards (GIAS):

guide the worldwide professional practice of internal auditing and serve as a basis for evaluating and elevating the quality of the internal audit function.



5 Domains, 15 Principles

Domain I: Purpose of Internal Auditing

II. Ethics and Professionalism

1. Demonstrate Integrity
2. Maintain Objectivity
3. Demonstrate Competency
4. Exercise Due Professional Care
5. Maintain Confidentiality

III. Governing the Internal Audit Function

6. Authorized by the Board
7. Positioned Independently
8. Overseen by the Board

IV. Managing the Internal Audit Function

9. Plan Strategically
10. Manage Resources
11. Communicate Effectively
12. Enhance Quality

V. Performing Internal Audit Services

13. Plan Engagements Effectively
14. Conduct Engagement Work
15. Communicate Engagement Conclusions and Monitor Action Plans

What's
actually
New



Emphasis on risk management

Proactive and forward-looking approach to risk management and an active role to ensure its effectiveness.



Define objectives and methodology

Holistic approach in applying the Standards to meet organisational objectives.



Technology driven

Efficiency and continuous improvement through technology enablement.



Culture and communication

Strong and open communication that requires the HOIA to maintain ethical culture.



Operational and governance

The HOIA manages operational functions while oversight remains with the Board.



Conformance

Added specificity to requirements for conformance.



Mandate

The HOIA and Board must align on the fundamental objectives and reporting structure of the Internal Audit function.



Execution of the plan

The HOIA must discuss the Essential Conditions for Governing the IA function.



Results

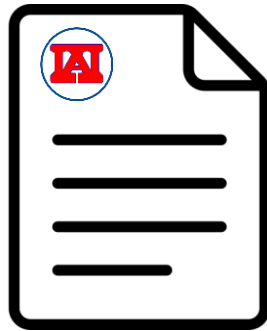
The HOIA must report on the IA function's performance, engagement results, barriers to fulfilling the IA plan, and quality.

Sumber: I Made Suandi Putra, Grant Thornton elaboration

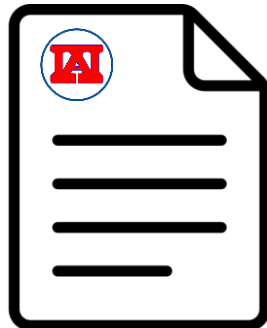
Pada tahun 2025, telah diberlakukan beberapa peraturan baru yang membutuhkan dukungan audit intern untuk memastikan implementasinya..



Global Internal Audit Standards (GIAS)

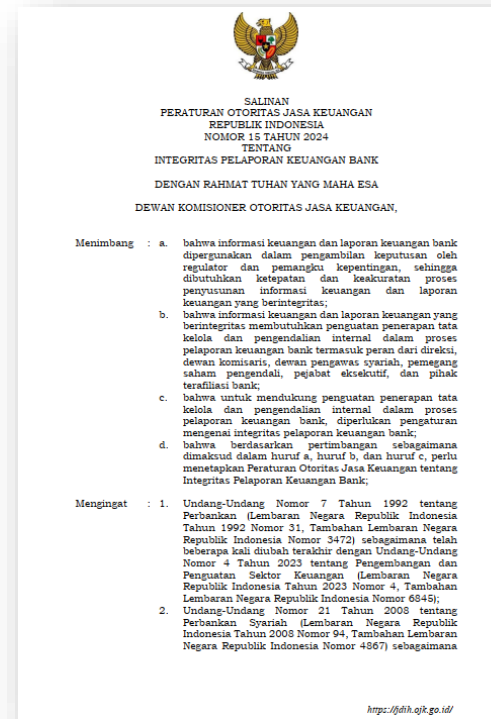


PSAK 117 Kontrak Asuransi
(mulai berlaku 1 Januari 2025)



SAK Entitas Privat
(mulai berlaku 1 Januari 2025)

POJK No. 15/2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank



POJK ini memperkuat penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank melalui **penerapan internal control over financial reporting (ICFR)** yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk menjaga keandalan, keakuratan, dan konsistensi informasi keuangan dan laporan keuangan bank

Fungsi audit intern juga diharapkan terus memastikan penerapan **Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024** tentang **Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi LJK (POJK SAF LJK)** telah dilaksanakan dengan memadai

4 PILAR PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD



RUANG LINGKUP POJK 12/2024



Dalam menyusun dan menerapkan SAF yang efektif, LJK wajib memperhatikan paling sedikit:

- kondisi lingkungan internal dan eksternal;
- kompleksitas kegiatan usaha;
- jenis Fraud;
- risiko terkait Fraud; dan
- kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

Untuk menerapkan tata kelola yang efektif, audit intern mesti berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit...

Tugas Dewan Komisaris

TUGAS PENGAWASAN (BOARD OVERSIGHT)

Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dan memastikan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan, prinsip kehati-hatian, dan kepentingan pemangku kepentingan.

PEMBERIAN ADVIS KEPADA DIREKSI

- Memberikan nasihat strategis kepada Direksi terkait kebijakan dan keputusan strategis.
- Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan pelaksanaan tata kelola perusahaan.

PEMANTAUAN TATA KELOLA

- Memastikan bank menerapkan kebijakan internal dan prosedur operasional yang konsisten dengan regulasi.
- Memastikan bank mematuhi prinsip GCG dan menjalankan fungsi kepatuhan, manajemen risiko, dan audit internal dengan baik.

PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA RUPS

- Menyampaikan hasil pengawasan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Mengawasi pelaksanaan keputusan RUPS oleh Direksi.



Komite Audit

Memantau dan mengevaluasi sistem pengendalian internal dan proses audit perusahaan.

Hubungan dengan Audit Internal

1. Walau Kepala Auditor Internal adalah Bagian dari Manajemen dan harus melapor kepada Direktur Utama, namun **Kepala Auditor Internal juga dapat melapor ("garis putus – putus") kepada Komite Audit.**
2. Peran Komite Audit dalam mengawasi fungsi audit internal:
 - a. Memberikan rekomendasi terhadap pengangkatan dan/atau penggantian Kepala Auditor Internal yang ditunjuk oleh Direktur Utama;
 - b. Meninjau Internal Audit Charter;
 - c. Meninjau struktur fungsi audit internal;
 - d. Meninjau rencana tahunan audit internal;
 - e. Memastikan kecukupan metodologi, alat, dan sumberdaya audit internal;
 - f. Meninjau semua laporan audit internal;
 - g. Memonitor kinerja fungsi audit internal;
 - h. Memastikan bahwa fungsi audit internal memenuhi standar profesional

Sumber:

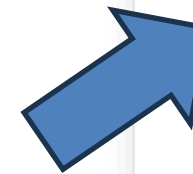
Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif, KNKG, 2022

Penerapan Tata Kelola di Seluruh Level Organisasi

Dalam POJK Tata Kelola terbaru, ruang lingkup penerapan tata kelola diperluas...

POJK NOMOR 55 TAHUN 2016	Perubahan	POJK NOMOR 17 TAHUN 2023
<ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris; b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern; c. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern; d. penerapan manajemen risiko; e. penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; f. rencana strategis; dan g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. 		<ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite; d. penanganan benturan kepentingan; e. penerapan fungsi kepatuhan; f. penerapan fungsi audit intern; g. penerapan fungsi audit ekstern; h. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; i. pemberian remunerasi; j. penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; k. integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; l. rencana strategis Bank; m. aspek pemegang saham; n. penerapan strategi anti fraud, termasuk anti penyuapan; o. penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan p. penerapan tata kelola dalam kelompok usaha Bank

Penerapan tata Kelola juga wajib dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan bank agar informasi keuangan yang disajikan andal dan akurat



POJK 15/2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank



SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN BANK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa informasi keuangan dan laporan keuangan bank dipergunakan dalam pengambilan keputusan oleh regulator dan pemangku kepentingan, sehingga dibutuhkan ketepatan dan keakuratan proses penyusunan informasi keuangan dan laporan keuangan yang berintegritas;
- b. bahwa informasi keuangan dan laporan keuangan yang berintegritas membutuhkan penguatan penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank termasuk peran dari direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, dan pihak terafiliasi bank;
- c. bahwa untuk mendukung penguatan penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank, diperlukan pengaturan mengenai integritas pelaporan keuangan bank;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana



Bank Diwajibkan:

- (1) Menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank (2) Memiliki prosedur internal terkait pelaksanaan tata kelola yang baik dan melakukan evaluasi secara berkala**

Ketentuan Pokok yang Mengatur tentang Direksi dan Dewan Komisaris

1. Prinsip penerapan tata Kelola mencakup: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness.
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris:
 - a. Jumlah Komposisi, Kriteria, Kode Etik, dan Pengaturan Rapat
 - b. Pengantian, Pemberhentian, dan/atau Pengangkatan
 - c. Masa Jeda (Cooling Off Period) bagi Direksi untuk menjadi Komisaris Independen
 - d. Peraturan mengenai Rangkap Jabatan

Larangan merangkap jabatan bagi anggota Direksi mencakup:

1. Menjabat sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), atau Pejabat Eksekutif di bank, perusahaan, dan/atau lembaga lainnya.
2. Memegang peran fungsional di bank dan/atau lembaga keuangan non-bank, baik di dalam maupun luar negeri.
3. Jabatan lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan

Masa Jeda (Cooling Off Period) bagi Komisaris Independen

- ❑ Mantan anggota Direksi,
- ❑ Mantan Pejabat Eksekutif
- ❑ Komisaris Non Independen, dan pihak lain yang memiliki hubungan dengan bank tunduk pada peraturan dan pembatasan [No Title] dari konflik kepentingan

Min: 1 Year



Min: 6 Month

- ❑ Mantan Direktur Utama,
- ❑ Mantan Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan;
- ❑ Mantan Pejabat Eksekutif yang Melaksanakan Fungsi Pengawasan

Integritas Pelaporan Keuangan Bank

Larangan Rangkap Jabatan & Ketentuan Cooling Off Period



POJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, diterbitkan untuk penguatan penerapan tata Kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank

POJK terdiri dari 8 BAB, dan 22 Pasal



13
Kementerian Dalam Negeri
Jalan Indonesia 100
SP 164/GK/PS/OJK/X/20

SIARAN PERS
PERKUAT INTEGRITAS, TATA KELOLA DAN DAYA TAHAN PERBANKAN OJK
TERBITKAN POJK INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN BANK

Berdasarkan pengawasan OJK, terdapat fakta **fraud dalam pelaporan keuangan** merupakan salah satu penyebab bank bermasalah hingga dicabut izin usahanya. Selain itu, Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dalam publikasi pada April 2024 menemukan adanya **kesengajaan yang dilakukan oleh Global Systemically Important Bank (G-SIB) dalam memanipulasi laporan keuangan** agar bank tersebut terlihat lebih aman.

Sumber:
Siaran Pers OJK Nomor SP-164/GKBP/OJK/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024



SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN BANK
DENGAN RAJUKAT TUMAH YANO MAMA ESA
DEWAN KOMISISONER OTORITAS JASA KEUANGAN

[illegible]

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6044);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1992 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4567) sebagaimana

POJK ini memperkuat penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank melalui **penerapan internal control over financial reporting (ICFR)** yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk menjaga keandalan, keakuratan, dan konsistensi informasi keuangan dan laporan keuangan bank, yang mengatur antara lain:

1. Memiliki kebijakan/prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, serta **larangan** bagi direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pejabat eksekutif terhadap praktek **window dressing**;
2. **Tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris** dalam proses pelaporan keuangan, termasuk pemantauan dan evaluasi oleh komite audit;
3. Kewajiban pihak terafiliasi untuk **menghindari tindakan intervensi** kepada bank dalam proses pelaporan keuangan;
4. **Sanksi** bagi bank, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pemegang saham pengendali, pihak terafiliasi, dan pejabat eksekutif bank, yang melanggar POJK berupa sanksi administratif berupa denda maupun non-denda yang signifikan

OJK telah menerbitkan POJK Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi



Latar Belakang

- memastikan **kepatuhan, integritas, dan profesionalisme** Manajer Investasi.
- Meningkatkan **kepercayaan investor** terhadap industri pengelolaan dana



Ruang Lingkup Pengaturan

1. Prinsip Utama

- Perlindungan investor dan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

2. Transparansi

- Informasi yang **jelas, akurat, dan tepat waktu** kepada investor
- Pengungkapan potensi konflik kepentingan.

3. Larangan

- Insider trading, manipulasi pasar, dan menguntungkan diri sendiri

4. Kewajiban Pengendalian Internal

- Pengawasan aktif manajemen dan pengendalian intern yang memadai

5. Hubungan dengan Investor

- Memberikan edukasi dan informasi risiko investasi.
- Pelayanan yang etis dan profesional.

OJK telah menerbitkan POJK Nomor 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan



Tujuan:



Perlindungan Pemegang Saham Publik



Memastikan Keterbukaan Informasi yang Lebih Baik



Memperkuat tata kelola perusahaan terbuka agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat, transparan, serta bebas dari konflik kepentingan yang dapat merugikan perusahaan atau pemegang saham minoritas

Transaksi Afiliasi adalah aktivitas atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau terkendali dengan atau untuk kepentingan afiliasi dari perusahaan, anggota direksi, dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.

Transaksi Benturan Kepentingan adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.

Pengaturan ini memastikan bahwa transaksi antara pihak-pihak yang terkait, seperti pemegang saham utama, anggota direksi, atau komisaris, dilakukan dengan cara yang transparan dan adil, tidak memberikan keuntungan berlebih kepada afiliasi yang berhubungan dengan manajemen.

OJK memperkuat kerangka hukum bidang Pasar Modal dengan menerbitkan regulasi turunan UU P2SK untuk mendukung efektivitas tugas pengawasan, penegakan hukum, dan perlindungan investor..



Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Transaksi dan Lembaga Efek

Substansi Pengaturan:

Pemberian jasa lain oleh Self-Regulatory Organizations (SRO), perluasan penjaminan penyelesaian Transaksi Efek, dan penggunaan dana jaminan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, Perdagangan EBUS LPS, serta kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha SRO dan Perusahaan Efek.



Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal

Substansi Pengaturan:

Persyaratan aktivitas Reksa Dana untuk dapat menerima dan/atau memberikan pinjaman, persyaratan Reksa Dana untuk dapat membeli saham Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif lain serta batasan investasi Reksa Dana. Diharapkan dengan perluasan aktivitas Reksa Dana dimaksud dapat memberikan ruang Reksa Dana untuk tumbuh dan berkembang.



Peraturan OJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik

Substansi Pengaturan:

Jangka waktu efektifnya pernyataan pendaftaran, konfirmasi perubahan informasi jumlah dan harga penawaran Efek, jangka waktu paling singkat terkait masa penawaran awal (bookbuilding), persyaratan dan jangka waktu perubahan status Perusahaan Terbuka menjadi perseroan tertutup sebagai akibat delisting, perubahan status Perusahaan Terbuka menjadi perseroan tertutup secara sukarela, jangka waktu penyampaian keterbukaan atas informasi atau fakta material, serta kedudukan pemegang saham publik dalam likuidasi emiten atau perusahaan publik.

Sumber: OJK (2024)

Dana Pensiun

Dana Pensiun diwajibkan **menunjuk aktuaris yang terdaftar di OJK** dalam mewujudkan penerapan tata kelola yang baik



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 /POJK.05/2019
TENTANG
TATA KELOLA DANA PENSIUN

Perlindungan Peserta

- Penggunaan aktuaris yang kompeten mendukung analisis keuangan yang cermat dan transparan guna melindungi hak-hak peserta

Penilaian Risiko & Kewajiban

- Aktuaris menghitung dan memproyeksikan kewajiban pensiun serta risiko terkait untuk memastikan perusahaan dana pensiun memiliki aset yang cukup guna memenuhi kewajiban kepada peserta

Transparansi & Akuntabilitas

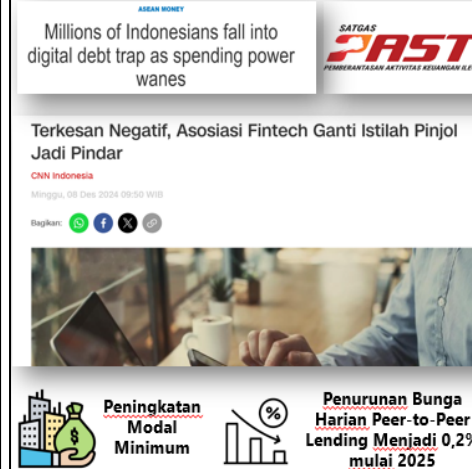
- Laporan aktuaris memberikan gambaran objektif atas kondisi keuangan perusahaan dana pensiun kepada otoritas dan pemangku kepentingan. Hal ini meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola aset peserta

Pemenuhan Regulasi

- Memenuhi ketentuan OJK sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko dana pensiun

LPBBTI/Pindar dan BNPL

OJK terus melakukan penguatan tata kelola khususnya pengaturan terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau Pinjaman Daring (Pindar) dan Buy Now Pay Later (BNPL) bagi Perusahaan Pembiayaan



Millions of Indonesians fall into digital debt trap as spending power wanes

TERKESAN NEGATIF, ASOSIASI FINTECH GANTI ISTILAH PINJOL JADI PINDAR

Terkesan Negatif, Asosiasi Fintech Ganti Istilah Pinjol Jadi Pindar

CNN Indonesia

Minggu, 08 Des 2024 09:50 WIB

Bagikan: WhatsApp Facebook Twitter Email

Peningkatan Modal Minimum

Penurunan Bunga Harian Peer-to-Peer Lending Menjadi 0,2% mulai 2025

1. Penyesuaian Batasan Manfaat Ekonomi LPBBTI

Tenor	Batas maksimum manfaat ekonomi per hari (%)		
	Konsumtif	Produktif	
		Mikro dan Ultra Mikro	Kecil dan Menengah
≤ 6 bulan	0,3	0,275	0,1
> 6 bulan	0,2	0,1	0,1

2. Penguatan Aturan Lender dan Borrower LPBBTI

- **Batas usia minimum:** 18 tahun atau telah menikah.
- **Penghasilan minimum borrower:** Rp3 juta/bulan.
- **Mulai berlaku:** 1 Januari 2027, untuk:
 - Akuisisi lender/borrower baru.
 - Perpanjangan pendanaan.

3. Penguatan Aturan Lender dan Borrower BNPL

- **Batas usia minimum debitur:** 18 tahun atau telah menikah.
- **Penghasilan minimum debitur:** Rp3 juta/bulan.
- **Mulai berlaku:** 1 Januari 2027, untuk:
 - Akuisisi nasabah/debitur baru.
 - Perpanjangan pembiayaan BNPL.

Source: RDKB Desember 2024 tanggal 7 Jan 2025

Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

OJK sedang menyusun Rancangan POJK Tata Kelola

Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (RPOJK Tata Kelola PVML)

LJK yang diatur:

1. Perusahaan Pembiayaan
2. Perusahaan Modal Ventura
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
4. Lembaga Keuangan Mikro
5. Perusahaan Pergadaian
6. Penyelenggara LPBBTI

Ruang Lingkup Pengaturan:

1. Jumlah dan Komposisi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
2. Rangkap Jabatan
3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
4. Pengangkatan, Penggantian, Pemberhentian, dan Pengunduran Diri
5. Cooling-off Period
6. Kewarganegaraan dan Domisili
7. Fungsi Kepatuhan, Komite
8. Penyelenggaraan Rapat
9. Pelaporan

Penerapan Tata Kelola di Koperasi Sektor Jasa Keuangan

**Koperasi
OPEN LOOP**

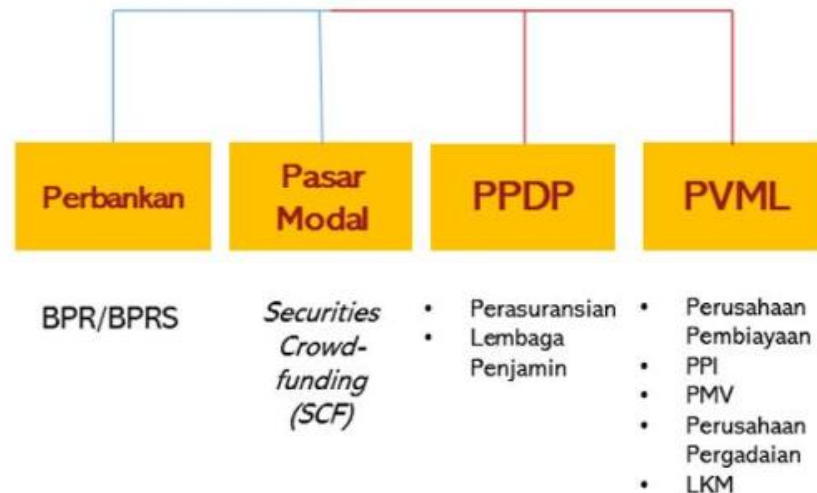


**Koperasi
CLOSE LOOP**

Transaksi dilakukan dengan berbagai pihak di luar anggota koperasi.

Transaksi hanya dilakukan oleh anggota koperasi

Koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan dapat memilih ruang lingkup sebagai LJK sebagai berikut



TIMELINE:

- 12 Januari 2025 – 12 Januari 2026:** Proses perizinan usaha Koperasi yang memilih menjadi LJK
- 12 Januari 2026:** OJK mulai melakukan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi SJK

Pasal 44H

KSP dan KSPPS dilarang:

- menghimpun dana selain dari Anggota Koperasi yang bersangkutan;
- menghimpun dana selain dari Koperasi lain;
- menghimpun Dana Kemitraan; dan
- menyalurkan pinjaman atau pembiayaan selain kepada Anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau Koperasi lain.

Draf RUU Koperasi

THANK YOU



Laporkan dugaan pelanggaran Insan OJK melalui:



www.wbs.ojk.go.id



wbs@ojk.go.id



PO BOX: ETIK OJK JKT 10000